



RAPAT KOORDINASI

**PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI**

Selasa, 2 September 2025

**TPID KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025**

UNDANGAN RADIOGRAM

 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA						
FORMULIR BERITA				Register No :		
PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT			
DARI : MENTERI DALAM NEGERI UNTUK : YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA 2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA TEMBUSAN : YTH. MENTERI DALAM NEGERI						
KLASIFIKASI : SANGAT SEGERA Nomor : 500.2.3/4815/SJ						
DALAM RANGKA ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERKEMBANGAN SITUASI TERKINI KMA AKAN DILAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI YANG DIRANGKAIKAN DENGAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA AAA TTK RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR <i>ONLINE</i> PD HARI SELASA TGL 2 SEPTEMBER 2025 PKL 08.00 WIB SD SELESAI MELALUI APLIKASI <i>ZOOM MEETING</i> DGN <i>MEETING ID 677 057 3756 PASSWORD INFLASI KMA</i> DGN FORMAT PENULISAN AKUN NAMA DAERAH GARING INSTANSI_JABATAN_NAMA PEJABAT KMA SERTA KANAL <i>YOUTUBE KEMENDAGRI RI</i> KMA YG DIPIMPIN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TTK KMA BBB TTK AGENDA RAKOR DIMAKSUD TERDIRI DARI ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERKEMBANGAN SITUASI TERKINI DAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 TTK KMA CCC TTK BERKENAAN DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA SATU TTK GUBERNUR SELURUH INDONESIA UTK HADIR LANGSUNG SCR <i>ONLINE</i> BERSAMA SELURUH JAJARAN FORKOPIMDA KMA PIMWIL BULOG PROV KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA DUA TTK BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA UTK HADIR LANGSUNG SCR <i>ONLINE</i> BERSAMA SELURUH JAJARAN FORKOPIMDA KMA PIMCAB BULOG KAB GARING KOTA KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA TIGA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA AGAR MENYIAPKAN PAPARAN TENTANG KONDISI TERKINI DI DAERAH KMA PERGERAKAN HARGA KMA KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI MASINGS DAERAH TTK KMA EMPAT TTK DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN GARING KOTA YANG AKAN PAPARAN KMA AKAN DIINFORMASIKAN LEBIH LANJUT TTK KMA LIMA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA MEMAKAI <i>DRESS CODE</i> PDH KHAKI DAN TANDA PANGKAT SERTA TANDA JABATAN TTK KMA DDD TTK UTK INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UP DIREKTORAT SUPD III KMA MELALUI SDR IMANUEL 082118800730 DAN SDRI NADIA 081343047244 TTK KMA EEE TTK DUM TTK HBS						
TANGGAL PEMBUATAN 1 September 2025						
Pengirim : a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL		No. Kode	Waktu/pukul		Lalu Lintas	Paraf Operator
Nama :  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Sekretaris Jenderal <u>Tomsy Tohir</u>			Terima	Kirim		
Tanda Tangan						

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Acara : Rakor Inflasi via zoom

Hari/Tanggal : Selasa / 2 Sept 2025

NO	NAMA	INSTANSI/SKPD	L/P	TANDA TANGAN
1	Sri Lailana	Asisten 2	P	1
2	Kurni	Ka. Ekspedisi	L	2
3	FANLURRAHMAN	Bag Eko & SDA	L	3
4	Eddy Rohandi	BPS	L	4
5	Taufik	POKpim	L	5
6	FITRYANI	USKAG Re.	L	6
7	Arief R.H	BP KAD	L	7
8	Tia Melyana	Inspektorat	P	8
9	Krisman	Disbominfo	L	9
10	Ixi	eko & sda		10
11	Rani			11
12	Mina			12
13	Endah	Eko & sda		13
14	Indra	Eko & SDA		14
15	Rudin	Eko & SDA		15
16	Jaoman	Ad bang		16
17	Dina	Ummu		17
18				18
19				19

NOTULEN RAPAT



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jalan. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 477256

NOTULEN RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Dasar : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/4815/SJ Tanggal 1 September 2025
- II. Maksud dan Tujuan : Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2025
- III. Peserta :
 1. Menteri Dalam Negeri
 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia
- IV. Waktu dan Tempat : Selasa, 2 September 2025 pukul 09.00 WITA
Via *Zoom Meeting* yang dilaksanakan di Aula Trisakti Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
- V. Hasil :
 1. **BADAN PANGAN NASIONAL**
 - a) Realisasi penyaluran SPHP beras Periode 1 Januari s.d terkini 1 September 2025 303.187 ton atau sebesar 20,21% dari target.
 - b) Rekomendasi tindak lanjut:
 - Agar perum bulog mensosialisasikan dan melatih para pedagang beras di pasar tradisional bisa menggunakan aplikasi Klik SPHP
 - Pengawasan bersama pemda dan satgas pangan POLRI
 - Publikasi penyaluran SPHP beras kepada publik secara luas dan berkelanjutan agar dapat diketahui semua
 - Mengoptimalkan sarana penyaluran SPHP beras
 - c) Aksi strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025
 - Realisasi serap gabah/beras sebanyak 2,93 juta ton setara beras
 - Penguatan cadangan beras pemerintah (CPP per 1 September 2025 sebanyak 3,93 juta ton)
 - Penyaluran beras SPHP (realisasi tahun 2025 sebanyak 303,1 ribu ton)
 - Penyaluran bantuan pangan tahun 2025 (10 kg beras per bulan kepada 18,3 juta KPM selama 2 bulan Juni-Juli)
 - Gerakan pangan murah (GPM) tahun 2025 terlaksana sebanyak 7.540 kali di 461 kab/kota dan 36 provinsi.
 - Panel harga pangan selalu up to date (terdapat 1.053 enumerator yang setiap hari akan melaporkan harga terupdate di lapangan).
 - Kios pangan sebanyak 1.467 unit yang tersebar di 33 provinsi dan 120 kab/kota.
 - Pemanfaatan sarana dan prasarana rantai dingin (2022-2024) (terdapat 42 sarpras)
 - Pemanfaatan sarana dan prasarana keamanan dan mutu pangan (sudah terdapat 17 mobil laboratorium keliling untuk pengawasan keamanan pangan pada tahun 2024)
 - Gerakan stop boros pangan serta penyelamatan pangan (gerakan ini untuk mengurangi food loss dan food waste)
 - B2SA go to school/pesantren, rumah pangan B2SA di desa, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal di 34 lokasi
 - Sinergi perumusan standar dan pengawasan keamanan pangan segar
 - Intervensi pengendalian kerawanan pangan di 8 provinsi 20 kota

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

45.000 kepala keluarga dan aksi kesiapsiagaan pangan di 4 provinsi.

2. BADAN PUSAT STATISTIK

- a) Dalam rangka memperingati HUT RI ke-80, sejumlah maskapai penerbangan memberikan beragam promo tiket pesawat.
- b) Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada Agustus 2025.
- c) Berdasarkan historis, 2021-2025 terjadi deflasi di setiap bulan Agustus. Tingkat deflasi Agustus 2025 adalah sebesar -0,08%, lebih rendah dibandingkan Agustus 2023 dan Agustus 2024.
- d) Kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi kelompok utama penyumbang deflasi di setiap bulan Agustus pada tahun 2022-2025. Komoditas utama penyumbang andil deflasi adalah tomat dan cabai rawit.
- e) Pada M4 Agustus 2025, tercatat 12 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 25 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun 1 provinsi tercatat relatif stabil. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 12 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai merah, bawang merah, dan beras.
- f) Secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH pada M4 Agustus 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH.

3. BULOG

- a) Pemerintah melalui Perum BULOG bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional, TNI, Polri, Pemerintah Daerah serta sejumlah BUMN pangan bersinergi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentan di 5.709 titik di seluruh Indonesia dengan menyalurkan lebih dari 42 ribu ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
- b) Penyaluran SPHP melibatkan peran Pemerintah Daerah dan saluran lainnya di 6.038 titik di seluruh Indonesia.
- c) Dalam upaya menstabilkan harga pangan, khususnya beras, Perum BULOG melalui GPM dengan instansi pemerintah pada tanggal 30 Agustus 2025 telah menyalurkan SPHP sebesar 20.147 ton.

4. JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- a) Aksi unjuk rasa dapat berpotensi menimbulkan gangguan distribusi pangan, stabilitas pasar, spekulasi harga dan keresahan publik yang dapat mendorong inflasi
- b) Kejaksaan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas hukum dan ekonomi dengan menindak pelanggaran, mencegah penyalahgunaan situasi dan mendukung kebijakan pengendalian inflasi agar sesuai aturan hukum melalui pendampingan hukum kepada Pemerintah Daerah.
- c) Rekomendasi dari Jamdatun terhadap Pemerintah Daerah:
 - Kejaksaan mendorong sinergi lintas sektor dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan kelancaran distribusi pangan serta komunikasi publik yang transparan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
 - Kelaksanan bersama penegak hukum lainnya akan melakukan pengawasan intensif serta menindak tegas setiap pelanggaran hukum seperti penimbunan barang dan praktik spekulasi harga.

5. KEMENTERIAN PERTANIAN

- a) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, agar setiap daerah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dg berdayakan

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik, memperlancar distribusi, pasar

b) Strategi operasional peningkatan produksi padi:

- Melakukan pengawalan dan pendampingan penanaman padi di seluruh areal sawah mulai dari bulan Mei 2025 dst.
- Mengoptimalkan kinerja pompanisasi, irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan khususnya pada areal sawah tadah hujan di wilayah masing-masing.
- Seluruh bantuan APBN untuk pompa air, irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan agar digunakan untuk kegiatan penanaman padi di wilayah masing-masing
- Melakukan pengawalan dan pendampingan percepatan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan dan cetak sawah rakyat bagi daerah yang mendapat kegiatan dimaksud sekaligus mengawal percepatan tanamnya di wilayah masing-masing
- Upaya dimaksud dilakukan agar luas tambah tanam padi bertambah dengan meningkatnya indeks pertanaman (IP) melalui pompanisasi, irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan, peningkatan produktivitas sehingga total produksi padi secara nasional dapat meningkat signifikan.

c) Rekomendasi kebijakan peningkatan produksi dan pengendalian inflasi cabai dan bawang merah:

- Meningkatkan luas tanam cabai dan bawang merah secara mandiri baik melalui alokasi APBD ataupun memanfaatkan Dana Desa (20% untuk ketahanan pangan) dan sumber- sumber lainnya (CSR Perusahaan dsb) dengan memperhatikan kebutuhan bulanan, ketersediaan lahan, kesesuaian agroklimat, musim tanam, teknologi budidaya, penanganan pascapanen hingga pemasaran
- Melakukan Kerjasama Antara Daerah (KAD) melibatkan para Champion berupa kerjasama pemenuhan pasokan dan/atau pendampingan teknis budidaya
- Mengoptimalkan pemanfaatan prasarana produksi benih dan tanaman yang sudah diberikan melalui fasilitasi APBN dan DAK Fisik seperti Nurseri, Screen house, GH sederhana dll untuk memproduksi benih semai dan pertanaman cabai dan bawang merah
- Mendorong Kelompok-Kelompok P2L yang pernah diberikan bantuan melalui APBN dan DAK Non Fisik untuk terus melakukan pertanaman cabai dipekarangan dan demplot masing-masing

d) Strategi operasional peternakan:

- Menyiapkan data terkait rencana produksi, harga Komoditas Peternakan, harga Sapronek (pakan) DOC secara rutin dan terupdate dalam upaya monitoring kondisi harga di daerah sentra peternakan;
- Memberikan data dan informasi untuk wilayah yang mengalami surplus sesuai prognosa produksi, sehingga upaya intervensi distribusi penyaluran daging ayam dan/atau telur konsumsi akan lebih tepat sasaran yaitu ditujukan ke wilayah defisit atau harga yang tinggi;
- Bersama Bapanas dan K/L terkait dalam hal penetapan kebijakan penyerapan live bird dan/atau telur konsumsi yang mengacu Harga Acuan Pemerintah (HAP) tingkat produsen/konsumen biaya produksi agar peternak memperoleh keuntungan yang wajar;
- Bersama Bapanas dan K/L lain berupaya mengeluarkan kebijakan terkait upaya penyerapan dengan menugaskan BUMN Pangan sehingga harga di pasaran dapat lebih stabil kembali;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian antara lain bersama

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

Bapanas, Kemendag, BUMN Pangan dan Satgas Pangan Dinas Pangan Provinsi serta stakeholder terkait pelaksanaan kegiatan penyerapan live bird dan/atau telur konsumsi di tingkat produsen dan asosiasi koperasi/pelaku usaha; dan

- Penyiapan infrastruktur di Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), Air Blast Freezer (ABF) & Cold Storage.
- Melakukan upaya pengendalian harga daging dengan pemantauan harga di kota-kota besar di Indonesia.
- Melakukan analisis supply demand terhadap wilayah-wilayah sentra ternak (produsen) sebagai wilayah pensupply ternak.
- Kegiatan optimalisasi reproduksi (IB) agar tetap dilaksanakan di semua provinsi tanpa dukungan anggaran APBN untuk meningkatkan kelahiran ternak.

6. KANTOR STAF PRESIDEN

- a) Rangkuman hasil pemantauan: status harga pangan strategis (update data per 29 Agustus 2025)

		DISPARITAS HARGA ANTAR DAERAH		
		Rendah	Sedang	Tinggi
STATUS HARGA	Aman		Daging Sapi, Kedelai	Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting
	Waspada		Gula Pasir Curah	Beras Medium (Zona 1), Beras Medium (Zona 2), Telur Ayam Ras, Daging Ayam Ras
	Tidak Aman			Beras Medium (Zona 3), Bawang Merah, Bawang Putih, Minyakita, Jagung Tk Peternak

- b) Rangkuman Kabupaten/Kota yang Masuk Peringkat 10 Harga Tertinggi selama Seminggu Terakhir (update data per 29 Agustus 2025)

Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas	Komoditas
Kab. Puncak Jaya	8	Bawang Merah, Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras, Daging Sapi
Kab. Intan Jaya	7	Bawang Merah, Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras
Kab. Puncak	6	Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Pegunungan Bintang	6	Bawang Merah, Beras Medium, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Minyakita, Daging Sapi
Kab. Nduga	6	Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah
Kab. Mappi	6	Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Tolikara	5	Bawang Putih, Beras Medium, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Lanny Jaya	4	Bawang Merah, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Dogiyai	3	Bawang Putih, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah
Kab. Mamberamo Raya	3	Bawang Putih, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah
Kab. Jayawijaya	3	Beras Medium, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Boven Digoel	3	Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Telur Ayam Ras
Kab. Paniai	3	Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras
Kab. Merauke	3	Telur Ayam Ras, Kedelai, Jagung Tk Peternak
Kab. Teluk Buntuni	2	Bawang Merah, Bawang Putih
Kab. Maybrat	2	Bawang Putih, Minyakita
Kab. Deiyai	2	Bawang Putih, Cabai Rawit Merah
Kab. Yalimo	2	Beras Medium, Gula Pasir Curah
Kab. Mahakam Ulu	2	Beras Medium, Daging Ayam Ras
Kab. Asmat	2	Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah
Kab. Kepulauan Tanimbar	2	Cabai Rawit Merah, Jagung Tk Peternak
Kab. Pegunungan Arfak	2	Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Mamberamo Tengah	2	Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Waropen	2	Minyakita, Kedelai
Kab. Konawe Selatan	2	Kedelai, Jagung Tk Peternak
Kab. Sorong	2	Kedelai, Jagung Tk Peternak
Kab. Karimun	2	Jagung Tk Peternak, Daging Sapi

7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- a) Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri No.000.4.6/3764/SJ Tanggal 11 Juli 2025 Hal Percepatan Pertumbuhan Ekonomin Daerah, makan Gubernur dan Bupati/Wali Kota diminta untuk:

- Membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang terdiri dari: Sekretaris Daerah sebagai ketua tim, Kepala Bappeda sebagai sekretaris, serta anggota yang terdiri dari unsur perangkat daerahm unsur kejaksaan, kepolisian. TNI, Bank Indonesia dan

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

- Melaksanakan 9 langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui website kendaliekonomi.kemendagri.gi.id paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.
- Mengalokasikan belanja daerah yang bersumber dari APBD pertumbuhan ekonomi daerah untuk mendukung pemantauan, pengawalan dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Berkoordinasi dengan BPS setempat untuk mengetahui perkembangan data pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.
- Kemendagri akan melakukan rapat koordinasi evaluasi atas capaian percepatan pertumbuhan ekonomi daerah pada minggu ke-4 setiap bulannya.

b) Arahan dan penekanan dari Mendagri:

- Secara konsisten melaksanakan rapat koordinasi atau anek pengendalian inflasi daerah
- Memastikan ketersediaan stok/pasokan secara rutin serta melakukan pengecekan ke lapangan/pasar.
- Perlu merinci jenis komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga.
- Pemda agar mengalokasikan anggaran untuk mengendalikan inflasi dengan BTT.
- Melakukan langkah yang lebih proaktif, konkrit dan cepat

8. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- a) Secara administrasi, 100% pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan bea PBG dan BPHTB atas tindak lanjut SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PUPR). KEMENDAGRI dan KEMENPKP akan melakukan pengawasan terhadap implementasi PBG dan BPHTB gratis di seluruh Indonesia.
- b) Pemerintah daerah wajib ikut serta menyukseskan program 3 juta rumah sebagai PSN (Pasal 67 UU No.23 tahun 2014).
- c) Bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan, akan menerima sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 2 kali hingga penonaktifan sementara hingga pemberhentian kepala daerah. (Pasal 68 UU No.23 Tahun 2014)
- d) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan terpadu bernama BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan). Layanan ini dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911
- e) Diminta kepada Pemerintah Daerah menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD ataupun APBN yang tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).
- f) Mengimplementasikan pembebasan bea PBG dan BPHTB bagi MBR.
- g) Mengalokasikan anggaran renovasi RTLH bagi daerah yang belum mengalokasikannya dalam APBD 2025.
- h) Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APBDes.
- i) Melaporkan hasil pendataan perumahan Kepada KemenPKP dan Kemendagri

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

REKOMENDASI TINDAK LANJUT TPID KOTA BANJARBARU

- 1) Indeks Perkembangan Harga (IPH) kondisi Minggu ke-4 Agustus 2025 di Kota Banjarbaru terjadi Perubahan Harga sebesar 0,34 (inflasi). Komoditas yang menjadi andil perubahan harga terbesar adalah Bawang Merah (0,2815), Daging Sapi (0,4106), dan Telur Ayam Ras (0,0971). Kedepannya TPID Kota Banjarbaru harus terus menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi deflasi serta tetap menjaga tingkat inflasi agar tidak melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
- 2) Agar TPID Kota Banjarbaru melaksanakan 6 upaya konkret secara penuh karena saat ini Kota Banjarbaru hanya melaksanakan beberapa upaya konkret saja.
- 3) Terus melakukan pemantauan harga dan menjaga stok barang agar tetap stabil
- 4) Melakukan rapat koordinasi TPID secara rutin dan berkala
- 5) memastikan komunikasi yang baik antara semua pemangku: pemerintah, BI, BPS, distributor, pedagang, dan petani
- 6) mengadakan pasar murah atau operasi pasar pada saat terjadi lonjakan IPH
- 7) Menggunakan media lokal untuk info harga acuan terbaru, jadwal pasar murah, dan prakiraan IPH
- 8) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, diharapkan Kota Banjarbaru mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dengan memberdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik serta memperlancar distribusi pasar

Demikian disampaikan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pembuat



DIAN YUDHA ASTUTI, SE

NIP. 197803042009012001

FILE FOTO (2 September 2025)



Dokumentasi kegiatan Rakor Inflasi (via zoom meeting) dengan Kemendagri di Aula Trisakti Sekretariat Kota Banjarbaru yang dihadiri oleh TPID Kota Banjarbaru